

**PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
BERDASARKAN ANALISA RASIO KEUANGAN
LAPORAN PERHITUNGAN APBD
Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Muryani

NIM: 012114078

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2005**

**PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
BERDASARKAN ANALISA RASIO KEUANGAN
LAPORAN PERHITUNGAN APBD
Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Muryani

NIM: 012114078

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2005**

SKRIPSI

**PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
BERDASARKAN ANALISA RASIO KEUANGAN
LAPORAN PERHITUNGAN APBD**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Oleh:
Muryani
NIM: 012114078

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.

Tanggal 3 Oktober 2005

Pembimbing II



Drs. G. Anto Listianto, M.S.A., Akt.

Tanggal 24 Oktober 2005

SKRIPSI

**PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
BERDASARKAN ANALISA RASIO KEUANGAN
LAPORAN PERHITUNGAN APBD**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Muryani

NIM: 012114078

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 9 November 2005
dan dinyatakan memenuhi syarat:

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Sekretaris : Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.
Anggota : Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.
Anggota : Drs. G. Anto Listianto, M.S.A., Akt.
Anggota : M. Trisnawati R., S.E., M.Si., Akt.

[Handwritten signatures of the five members of the examination committee]

Yogyakarta, 9 November 2005
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,



[Handwritten signature of Alex Kahu Lantum]
Alex Kahu Lantum, M.S.

Hero

Mariah Carey

*There's a hero
If you look inside your heart
You don't have to be afraid
Of what you are
There's an answer
If you read into your soul
And the sorrow that you know
Will melt away*

**Chorus
And then the hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fear aside
And you know you can survive!
So when you feel like hope is gone
Look inside you and be strong!
And you will finally see the truth
That a hero lies in you*

*It's a long road
When you face the world alone
No one reaches out a hand
For you to hold
You can find love
If you search within yourself
And the emptiness you felt
Will disappear*

back to chorus

*Lord knows
Dreams are hard to follow
But don't let anyone tear them away
Hold on!
There will be tomorrow
In time you will find the way*

back to chorus

*A smile to start your day, a prayer to bless your way, a song to lighten the moments, a cheer to
praise His presence.....
(nn)*

*Skripsi ini aku persembahkan untuk;
Orang tuaku tersayang,
Kakak-kakakku
dan
Keluarga besar Universitas Sanata Dharma*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, Oktober 2005

Penulis



Muryani

ABSTRAK

PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN ANALISA RASIO KEUANGAN LAPORAN PERHITUNGAN APBD

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman

**Muryani
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2005**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui perkembangan keuangan daerah Kabupaten Sleman ditinjau dari rasio kemandirian selama tahun 2001-2003. (2) Mengetahui perkembangan keuangan daerah Kabupaten Sleman ditinjau dari rasio efektivitas dan efisiensi selama tahun 2001-2003. (3) Mengetahui perkembangan keuangan daerah Kabupaten Sleman ditinjau dari rasio pertumbuhan selama tahun 2001-2003.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Analisa data kuantitatif digunakan untuk menghitung besarnya rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi, serta rasio pertumbuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Rasio kemandirian Kabupaten Sleman yang diukur melalui PAD, hanya mencapai rata-rata sebesar 10,12% untuk setiap tahun dan mengalami peningkatan tiap tahun sebesar 0,53%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian Kabupaten Sleman masih jauh dari yang diharapkan. (2) Rasio efektivitas pemungutan PAD Kabupaten Sleman mencapai rata-rata sebesar 114,85% dengan peningkatan sebesar 5,35% tiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemungutan PAD sudah efektif. Sedangkan rasio efisiensi pemungutan PAD mencapai rata-rata sebesar 6,57% tiap tahun. Penurunan rasio efisiensi sebesar 0,8% menunjukkan bahwa pemungutan PAD semakin efisien tiap tahunnya. (3) Rasio pertumbuhan APBD pada tahun 2001 sampai dengan 2003 cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada komponen belanja operasi dan pemeliharaan yang mengalami penurunan sebesar 72,13%..

ABSTRACT

A FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION OF GOVERNMENT REGENCY BASED ON FINANCIAL RATIO ANALYSIS OF THE REGIONAL EXPENDITURE AND INCOME BUDGET CALCULATION REPORT

A Case Study at The Government of Sleman Regency

Muryani

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2005

This research was aimed: (1) To know the financial development of Sleman Regency from its autonomy ratio for the years of 2001-2003. (2) To know the financial development of Sleman Regency from its regional real income (RRI) charging effectiveness ratio and regional real income (RRI) charging efficiency ratio for the years of 2001-2003. (3) To know the financial development of Sleman Regency from its growth ratio for the years of 2001-2003.

The research was a case study at the Government of Sleman Regency. The data obtaining techniques used in this research were documentation and interview. The quantitative data analysis was used to appraise the autonomy ratio, the

regional real income (RRI) charging effectiveness ratio and the regional real income (RRI) charging efficiency ratio, as well as the growth ratio.

The result of this research pointed that: (1) The average of autonomy ratio of Sleman Regency shown by the regional real income (RRI) for each year was only 10.12% with 0.53% annual increasing. It means that the local autonomy of Sleman Regency was still far from expectation. (2) The regional real income (RRI) charging effectiveness ratio of Sleman Regency for each year was 114.85% in average with 5.53% annual increasing, which means that the regional income (RRI) charging of Sleman Regency was already effective. Meanwhile, the regional real income (RRI) charging efficiency ratio of Sleman Regency of each year was 6.57% in average. The decreasing of regional real income (RRI) charging efficiency was 0.8% every year, which means that the regional real income (RRI) charging was getting more efficient. (3) The growth ratio of expenditure and income budget for the years of 2001-2003 tended to increase except for the operational expenditure and treatment expenditure that was still decreasing up to 72.13%.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Bapa di surga atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Analisa Rasio Keuangan Laporan Perhitungan APBD”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari pihak lain, skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. **Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
2. **Ir. Drs. Hansiadi Y.H, M.Si., Akt.** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. **Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Penasehat Akademik yang dengan penuh perhatian dan kesabaran membantu penulis dengan memberikan masukan, saran, nasehat, dan semangat selama proses penulisan skripsi.

4. **Drs. G. Anto Listianto, M.S.A., Akt.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, koreksi, dan banyak saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt.** selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan koreksi dan masukan kepada penulis.
6. **M. T. Ernawati, S.E., M.A.** terima kasih telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis.
7. **Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma** yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah di Universitas Sanata Dharma dan karyawan-karyawati yang telah banyak membantu.
8. **Drs. Slamet Riyadi, M.M.** selaku Kepala Sub Bidang Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
9. **Dra. Nogati Sri Karyati, M.S.** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
10. **Dra. Nurlela Dimiyati, M.M.** selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.
11. **Tin Ibriz Fanna, S.E.** selaku staf Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman yang dengan sabar dan penuh senyuman memberikan banyak bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian.

10. **Ibuku Christina Sumarsi** yang ada disurga atas segala cinta dan semangat yang telah ia tanamkan dihatiku...*You're my everlasting spirit!!*
11. **Bapakku Adi Marsono** yang dengan sabar, penuh cinta, dan perhatian telah mendidik dan membesarkanku, terima kasih yang tak terhingga atas segala doa, dan kasih sayang yang selalu ada untukku.
12. **Om Fx. Marjana dan keluarga**, terima kasih atas segala doa dan perhatian yang selalu diberikan.
13. **Kakak-kakakku: Mas Danang, Mba Tanti, Mba Yuni, Mba Tiwi** yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang dan pengertian untukku....*I'm happy to have you all!!*
14. **Sinta...my dearest cousin**, terima kasih atas perhatian, dorongan dan kesabarannya mendengarkan cerita-ceritaku. *You give me inspirations to be change!!*
15. **Yuliana Trisnawati** yang telah banyak memberikan doa, bantuan dan masukan kepada penulis.
16. **Iswi, Irum, Sukas, Christa...my best friends**, terima kasih atas persahabatan terindah yang kalian berikan. *Let's make our dreams come true!!*
17. **Berta, Endah, Sari...my lovely friends**, terima kasih atas doa, bantuan, dorongan, dan perhatian yang selalu diberikan.

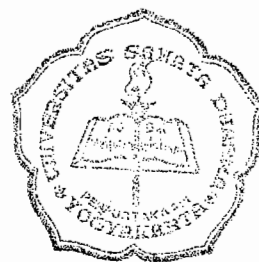
18. Teman-temanku yang selalu memberikan doa dan keceriaan: **Susan, Upix, Ruli, Dian, Ayu, Indah, Nita, Mila, Ensy, Ardho, Dika, Dedy, Wulan & Fredy, Rini & Wiwid. *I love you guys!!***
19. Teman-temanku di *Cana Community*, terima kasih atas doa dan segala pengalaman baru yang diberikan selama ini.
20. Teman-temanku di *English Extension Course*: **Detty, Dora, Casio, Seri, Erva, Vie...**terima kasih selalu menanyakan kapan aku ujian!
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran yang dapat membantu sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

Yogyakarta, Oktober 2005

Penulis

DAFTAR ISI



Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HERO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Batasan Masalah	1
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan	4

BAB II. LANDASAN TEORI	7
A. Penilaian Kinerja	7
B. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .	10
C. Karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	11
D. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	13
E. Analisis Rasio Keuangan pada APBD	14
BAB III. METODA PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Tempat dan Waktu Penelitian	22
C. Subyek dan Obyek Penelitian	22
D. Data yang Dicari/ Dibutuhkan	23
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Teknik Analisis Data	24
BAB IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN	31
A. Sejarah kabupaten Sleman	31
B. Keadaan Geografis	32
C. Keadaan Penduduk	33
D. Agama	36
E. Pemerintahan	37
BAB V. ANALISA DAN PEMBAHASAN	40
A. Perkembangan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Ditinjau dari Rasio Kemandirian	40
1. Menghitung Rasio Kemandirian	40

2. Perkembangan rasio Kemandirian Kabupaten Sleman	43
B. Perkembangan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Ditinjau dari	
Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi	45
1. Menghitung Rasio Efektivitas PAD	45
2. Perkembangan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Sleman ..	47
3. Menghitung Rasio Efisiensi PAD	48
4. Perkembangan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Sleman	50
C. Perkembangan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Ditinjau dari	
Rasio Pertumbuhan	51
BAB VI. PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Keterbatasan.....	56
C. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	18
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman Tahun 2001	34
Tabel 4.2 Perkembangan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2001	34
Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Sleman.....	36
Tabel 4.4 Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Jenisnya di Kabupaten Sleman Tahun 2000/2001	37
Tabel 4.5 Jumlah Pegawai Otonomi Daerah Menurut Instansi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman Tahun 2001	38
Tabel 5.1 Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Sleman Tahun 2001 – 2003	40
Tabel 5.2 Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Kabupaten Sleman Tahun 2001 – 2003	41
Tabel 5.3 Rasio Kemandirian Kabupaten Sleman Tahun 2001 – 2003	41
Tabel 5.4 Tabel Trend Rasio Kemandirian Kabupaten Sleman Tahun 2001 – 2003	43
Tabel 5.5 Perkembangan Target PAD Kabupaten Sleman Tahun 2001 – 2003	45
Tabel 5.6 Rasio Efektivitas Kabupaten Sleman Tahun 2001 – 2003.....	45
Tabel 5.7 Tabel Trend Rasio Efektivitas Pemungutan PAD Kabupaten Sleman	47
Tabel 5.8 Rasio Efisiensi Kabupaten Sleman Tahun 2001 – 2003	49
Tabel 5.9 Tabel Trend Rasio Efisiensi Kabupaten Sleman Tahun 2001 – 2003	50
Tabel 5.10 Rasio Pertumbuhan Kabupaten Sleman Tahun 2001 - 2003	52

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 5.1 Trend Rasio Kemandirian	44
Grafik 5.2 Trend Rasio Efektivitas.....	48
Grafik 5.3 Trend Rasio Efisiensi.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia memberikan dampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun di sisi yang lain, krisis tersebut dapat juga memberi “berkah tersembunyi” (*blessing in disguised*) bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Hal itu karena, krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota (Mardiasmo, 2002: 3).

Untuk mempercepat terwujudnya tata pemerintahan yang baik, pemerintah telah melaksanakan otonomi daerah sejak Januari 2001 (Dwiyanto, dkk., 2002: 7). Otonomi daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan *budgeting reform* atau reformasi anggaran. *Budgeting reform* meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (Mardiasmo, 2002: 104).

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif (Mardiasmo, 2002: 121).

Penulis dalam hal ini akan menggunakan rasio keuangan pada APBD untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman setelah adanya otonomi daerah yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003. Dengan menggunakan rasio keuangan pada APBD, dapat diketahui tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya dalam usaha menyejahterakan masyarakat daerahnya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perkembangan keuangan daerah Kabupaten Sleman selama tahun 2001-2003 ditinjau dari rasio kemandiriannya?
2. Bagaimanakah perkembangan keuangan daerah Kabupaten Sleman selama tahun 2001-2003 ditinjau dari rasio efektivitas dan efisiensi PAD?
3. Bagaimanakah perkembangan keuangan daerah Kabupaten Sleman selama tahun 2001-2003 ditinjau dari rasio pertumbuhan?

C. BATASAN MASALAH

1. Penilaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan pada rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, dan rasio pertumbuhan pada APBD tahun 2001-2003.
2. Penilaian yang dilakukan terbatas pada perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui perkembangan keuangan daerah Kabupaten Sleman ditinjau dari rasio kemandirian selama tahun 2001-2003.
2. Untuk mengetahui perkembangan keuangan daerah Kabupaten Sleman ditinjau dari rasio efektivitas dan efisiensi selama tahun 2001-2003.
3. Untuk mengetahui perkembangan keuangan daerah Kabupaten Sleman ditinjau dari rasio pertumbuhan selama tahun 2001-2003.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan keuangan daerah yang dimuat dalam APBD.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan, wawasan, dan pengetahuan baik bagi mahasiswa Universitas Sanata Dharma maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap topik yang diteliti oleh penulis.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang telah diterima selama berada di bangku kuliah dan menambah wawasan dengan terjun langsung ke lapangan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah yang dibatasi pada penilaian kinerja berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, dan rasio pertumbuhan dari tahun 2001-2003. Bab ini menguraikan pula tujuan penelitian, manfaat penelitian baik bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, bagi Universitas Sanata Dharma dan manfaat bagi penulis, serta diuraikan pula sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini akan dijelaskan maksud dari penilaian kinerja, pengukuran kinerja pada sektor publik, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), fungsi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), analisa rasio keuangan pada APBD, dan review penelitian sebelumnya.

BAB III Metoda Penelitian

Dalam bab ini akan dipaparkan jenis penelitian yang dilakukan, subyek penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Untuk melakukan analisa data, dihitung besarnya rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan perkembangan dari masing-masing rasio. Untuk mengetahui besarnya rasio pertumbuhan, dilakukan perhitungan pertumbuhan dari masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran.

BAB IV Gambaran Umum Kabupaten Sleman

Dalam gambaran umum Kabupaten Sleman akan dipaparkan mengenai sejarah berdirinya, keadaan geografis, keadaan penduduk, agama, dan pemerintahan.

BAB V Analisa Data dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan analisa dan pembahasan perkembangan keuangan Kabupaten Sleman ditinjau dari tingkat kemandirian, rasio efektivitas pemungutan PAD, rasio efisiensi pemungutan PAD, dan dari rasio pertumbuhan.

BAB VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan analisa data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, keterbatasan-keterbatasan penelitian, serta beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak Pemerintah Kabupaten Sleman.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENILAIAN KINERJA

1. Pengertian Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja sektor publik sangat penting untuk dilaksanakan, hal ini karena untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dan sampai dimana prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu transparansi, akuntabilitas, dan *value for money* telah dilaksanakan.

Penilaian kinerja atau *performance evaluation* menurut Blocher, dkk. (1999: 723) dalam bukunya yang berjudul *Cost Management* adalah:

The process by which managers at all levels gain informations about the performance of tasks within the firm and judge that performance againts preestablished criteria as set out in budgets, plans, and goals.

Dengan kata lain penilaian kinerja adalah suatu proses dimana manajer pada semua level menerima informasi tentang kinerja tugas-tugas yang dikerjakan dalam organisasi dan menilai hasil kerja tersebut berdasarkan kriteria-kriteria seperti yang telah ditetapkan dalam anggaran-anggaran, rencana-rencana, dan tujuan-tujuan organisasi.

Menurut Mulyadi (1993: 419) penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi , bagian organisasi,

dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. Penilaian kinerja dilakukan untuk menekankan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik (Mulyadi, 1993: 420).

Penilaian kinerja bermanfaat untuk: (1) mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum, (2) membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan promosi, transfer, dan pemberhentian karyawan, (3) mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka, (4) menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan (Mulyadi, 1993: 420).

2. Pengukuran Kinerja pada Sektor Publik

Kinerja sektor publik bersifat multi dimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang

dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat *intangible output*, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu perlu dikembangkan ukuran kinerja non-finansial.

Menurut Mardiasmo (2002: 121), pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan sektor publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Manfaat pengukuran kinerja :

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah
- b. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati

- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

B. PENGERTIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan instruksi menteri dalam negeri serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan. Pada sisi lain APBD dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja (Halim, 2004: 234).

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Mardiasmo (2002: 9) dalam bukunya Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun).

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Mamesah (1995: 20) adalah:

Rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-

kegiatan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Definisi tersebut mengandung unsur sebagai berikut (Mamesah, 1995: 20-21):

1. Rencana operasional daerah, yang menggambarkan adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dimana aktivitas tersebut telah diuraikan secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang ada merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Dituangkan dalam bentuk angka, jenis kegiatan dan jenis proyek.
4. Untuk keperluan satu tahun anggaran.

C. KARAKTERISTIK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Karakteristik APBD (Halim, 2004: 16-17) di era pra reformasi antara lain:

- a. APBD disusun oleh DPRD bersama-sama Kepala Daerah (pasal 30 UU No. 5/1975).
- b. Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah pendekatan *line item* atau pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran. Oleh karena itu, setiap baris dalam APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran.

Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tradisional (tertua) diantara berbagai pendekatan penyusunan anggaran.

- c. Siklus APBD terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, penyusunan dan perhitungan APBD. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintah Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, pertanggungjawaban bersifat vertikal.
- d. Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan dan tahap penyusunan dan penetapan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/audit bersifat keuangan. Hal ini tampak pada pengawasan pendapatan daerah dan pengawasan pengeluaran daerah.
- e. Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan tiga unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan unsur hasil program (untuk proyek-proyek daerah).
- f. Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan stelsel kameral (tata buku anggaran). Menurut stelsel (sistem pembukuan) ini, penyusunan anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dasar pemilihan stelsel adalah tujuan pembukuan.

Di era (pasca) reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan cukup mendasar. Bentuk APBD yang baru didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif. Untuk itu, dalam bentuk yang baru, APBD terdiri atas tiga bagian, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era pra reformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah.

D. FUNGSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2002: 9). Adapun fungsi APBD (Mamesah, 1995: 18) adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat daerah yang bersangkutan.

- b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
- c. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepada daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah.
- d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna
- c. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah di dalam batas-batas tertentu.

E. ANALISA RASIO KEUANGAN PADA APBD

Analisa keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Penggunaan analisa rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak digunakan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisa terhadap rasio keuangan perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2004: 283).

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan pada APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2004: 282). Rasio

keuangan adalah merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lainnya dari suatu laporan keuangan (Syafaruddin, 1989: 95). Penganalisa dapat mempelajari komposisi perubahan dan menentukan apakah ada peningkatan atau penurunan dalam kondisi dan prestasi keuangan selama waktu yang dianalisa. Rasio keuangan juga dapat dihitung untuk proyeksi atau proforma laporan dan membandingkan antara rasio sekarang dengan rasio yang lalu (Agus, 1994: 102).

Analisa rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah yang lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Beberapa rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain (Halim, 2004: 284-291):

1. Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan

asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah, akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola hubungan yang memperkenalkan "Hubungan Situasional" yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah antara lain (Halim, 2004: 188-189):

- a. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat, sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang semakin baik, rasio efektivitas tersebut perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan

pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}$$

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$r = \frac{Pt - Po}{Po}$$

Keterangan:

Pt = data pada tahun tertentu

Po = data pada tahun ke-0

r = pertumbuhan

F. REVIEW PENELITIAN SEBELUMNYA

Widodo (2000) telah melakukan analisa rasio keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali yang dimuat dalam buku Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Berdasarkan analisa tersebut disimpulkan bahwa kemandirian Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah dan bahkan cenderung turun yaitu dari 16,65% pada tahun anggaran 1997/1998 menjadi 9,69% pada tahun 2000. Sebagian besar pendapatan Kabupaten Boyolali masih diprioritaskan untuk mencukupi belanja rutin yaitu rata-rata mencapai 80% dari total pendapatan yang diterima.

Penelitian sejenis juga telah dilakukan oleh Ruslina Nadeak (2003) yang melakukan studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Dari penelitiannya tersebut disimpulkan bahwa tingkat kemandirian hanya mencapai

rata-rata 2,93% untuk setiap tahun anggaran dan peningkatan tiap tahun anggaran sebesar 0,46%. Rasio efektivitas rata-rata sebesar 89,59% dengan peningkatan tiap tahunnya sebesar 7,22%. Rasio efisiensi rata-rata sebesar 3,27% dan setiap tahunnya mengalami penurunan 0,1%.

BAB III

METODA PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus, yaitu penelitian terhadap obyek tertentu, kemudian dari data tersebut dianalisa dan ditarik kesimpulan.

B. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

a. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sleman.

b. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret 2005 sampai dengan selesai.

C. SUBYEK DAN OBYEK PENELITIAN

a. Subyek Penelitian

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.
3. BPS Kabupaten Sleman

b. Obyek Penelitian

1. Data perhitungan APBD tahun 2001 sampai dengan tahun 2003.
2. Data target biaya pemungutan dan realisasi biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2001 sampai dengan 2003.

3. Data target penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2001 sampai dengan 2003.
4. Data realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2001 sampai dengan 2003.

D. DATA YANG DICARI/DIBUTUHKAN

- a. Gambaran umum Kabupaten Sleman.
- b. APBD tahun 2001 sampai dengan tahun 2003.
- c. Target PAD tahun 2001 sampai dengan tahun 2003.
- d. Realisasi PAD tahun 2001 sampai dengan tahun 2003.
- e. Target biaya pemungutan PAD tahun 2001 sampai dengan tahun 2003.
- f. Realisasi Biaya pemungutan PAD tahun 2001 sampai dengan tahun 2003.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan baik berupa data primer maupun data sekunder, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data tersebut: data gambaran umum Kabupaten Sleman, data APBD, target PAD, realisasi PAD, target biaya pemungutan PAD, dan realisasi biaya pemungutan PAD di Kabupaten Sleman.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian, yakni pejabat yang berwenang. Teknik wawancara ini dilakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan yang tidak dapat ditemukan dalam teknik pengumpulan data secara dokumentasi.

F. TEKNIK ANALISA DATA

Untuk menjawab permasalahan pertama, penulis menggunakan dua langkah yaitu:

1. Menghitung Rasio Kemandirian dengan langkah-langkah:
 - a. Menjumlahkan komponen-komponen realisasi pendapatan asli daerah dari tiap-tiap tahun
 - b. Menghitung total pendapatan dari tiap-tiap tahun
 - c. Membagi pendapatan asli daerah dengan total pendapatan
 - d. Pembahasan.
2. Untuk mengetahui perkembangan rasio kemandirian tersebut digunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan trend. Dengan formula:

$$Y' = a + bX$$

$$a = \frac{\Sigma Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X}$$



Keterangan:

Y = Variabel rasio kemandirian

Y' = Trend

a = Besarnya Y saat X = 0

b = Besarnya perubahan Y bila X mengalami perubahan 1 satuan

X = Waktu

Untuk mengetahui besarnya perkembangan rasio kemandirian Kabupaten Sleman, dibuat tabel trend rasio kemandirian.

Tabel Trend Rasio Kemandirian Kabupaten Sleman
Tahun 2001-2003

Tahun anggaran	Tingkat Kemandirian (Y)	X	XY	X ²	Y'
2001					
2002					
2003					
Total					

Dari tabel trend rasio kemandirian dapat diketahui besarnya rata-rata rasio kemandirian dengan melihat besarnya nilai a yang diperoleh. Besarnya prosentase perkembangan kemandirian setiap tahun dapat dilihat dari besarnya nilai b. Untuk memperjelas tabel trend rasio kemandirian dapat dilihat melalui grafik sebagai berikut:



Untuk menjawab permasalahan kedua, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung Rasio Efektivitas dengan langkah-langkah:
 - a. Menjumlahkan komponen-komponen realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman dari tiap-tiap tahun
 - b. Menjumlahkan komponen-komponen target penerimaan pendapatan asli daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dari tiap-tiap tahun
 - c. Membagi realisasi pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
 - d. Pembahasan.
2. Untuk mengetahui perkembangan rasio efektivitas tersebut, digunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan trend. Dengan formula:

$$Y' = a + bX$$

$$a = \frac{\Sigma Y}{n}$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X}$$

Keterangan:

Y = Variabel rasio efektivitas

Y' = Trend

a = Besarnya Y saat X = 0

b = Besarnya perubahan Y bila X mengalami perubahan 1 satuan

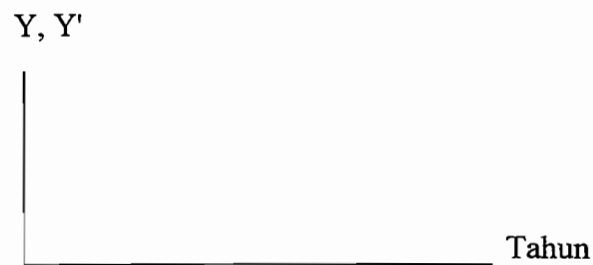
X = Waktu

Untuk mengetahui perkembangan efektivitas pemungutan PAD, dibuat tabel trend rasio efektivitas pemungutan PAD.

Tabel Trend Rasio Efektivitas Pemungutan PAD Kabupaten Sleman
Tahun 2001-2003

Tahun anggaran	Tingkat Efektivitas (Y)	X	XY	X ²	Y'
2001					
2002					
2003					
Total					

Dari tabel trend rasio efektivitas pemungutan PAD dapat diketahui besarnya rata-rata efektivitas pemungutan PAD dengan melihat besarnya nilai a yang diperoleh. Besarnya prosentase perkembangan pemungutan PAD dapat dilihat dari besarnya nilai b. Untuk memperjelas tabel trend efektivitas pemungutan PAD dapat dilihat melalui grafik sebagai berikut:



3. Menghitung rasio efisiensi dengan langkah-langkah:
 - a. Menjumlahkan komponen-komponen biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah dari tiap-tiap tahun
 - b. Menjumlahkan komponen-komponen realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari tiap-tiap tahun
 - c. Membagi biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah
 - d. Pembahasan.

4. Untuk mengetahui perkembangan rasio efisiensi tersebut, digunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan trend. Dengan formula:

$$Y' = a + bX$$

$$a = \frac{\Sigma Y}{n}$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X}$$

Keterangan:

Y = Variabel rasio efisiensi

Y' = Trend

a = Besarnya Y saat $X = 0$

b = Besarnya perubahan Y bila X mengalami perubahan 1 satuan

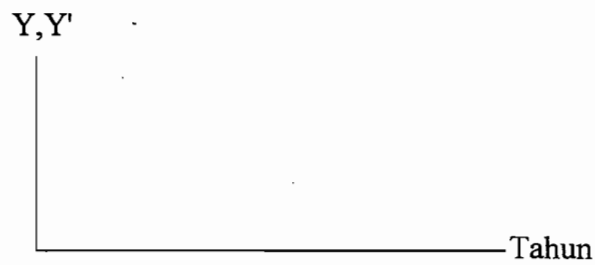
X = Waktu

Untuk mengetahui perkembangan efisiensi pemungutan PAD, dibuat tabel trend rasio efisiensi pemungutan PAD.

Tabel Trend Rasio Efisiensi Pemungutan PAD Kabupaten Sleman
Tahun 2001-2003

Tahun anggaran	Tingkat Efisiensi (Y)	X	XY	X^2	Y'
2001					
2002					
2003					
Total					

Dari tabel trend pemungutan PAD dapat diketahui besarnya rata-rata efisiensi pemungutan PAD dengan melihat besarnya nilai a yang diperoleh. Besarnya prosentase perkembangan pemungutan PAD dapat dilihat dari besarnya nilai b . Untuk memperjelas tabel trend efisiensi pemungutan PAD dapat dilihat melalui grafik sebagai berikut:



Untuk menjawab permasalahan ketiga, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung pertumbuhan dari masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran, dengan cara hasil yang dicapai pada tahun anggaran tertentu dikurangi dengan hasil yang dicapai pada tahun ke-0 kemudian dibandingkan dengan hasil yang dicapai pada tahun ke-0.
2. Pembahasan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

A. SEJARAH KABUPATEN SLEMAN

Berdasarkan Perda no. 12 tahun 1998 tertanggal 19 Oktober 1998, menetapkan tanggal 15 (lima belas) Mei tahun 1916 merupakan hari jadi Sleman. Disini perlu ditegaskan bahwa hari jadi Sleman adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan hari jadi Pemerintah Kabupaten Dati II Sleman. Penegasan ini diperlukan mengingat keberadaan Kabupaten Sleman. Penegasan ini diperlukan mengingat keberadaan Kabupaten Sleman jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai wujud lahirnya negara Indonesia modern, yang memunculkan Pemerintah Dati II Sleman.

Keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman memiliki arti penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan.

Dalam perhitungan Almanak, hari jadi Kabupaten Sleman jatuh pada hari Senin Kliwon, tanggal 12 Rejeb tahun Je 1846 Wuku Wayang. Atas dasar perhitungan tersebut ditentukan surya sungkala (perhitungan tahun Masehi) Rasa Manunggal Hanggatra Negara yang memiliki arti Rasa = 6, Manunggal = 1, Hanggatra = 9, Negara = 1, sehingga terbaca tahun 1916. Sementara menurut perhitungan Jawa (Candra Sengkala) hari jadi Kabupaten Sleman adalah Anggana Catur Salira Tunggal yang berarti Anggana = 6, Catur = 4, Salira = 8, Tunggal = 1, sehingga terbaca tahun tertanggal 15 Mei 1916.

B. KEADAAN GEOGRAFIS

1. Letak Wilayah

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $107^{\circ} 15' 03''$ dan $107^{\circ} 29' 30''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Kabupaten Sleman sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi DIY.

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara-Selatan 32 Km, Timur-Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

Secara administratif Kabupaten Sleman terbagi menjadi 17 Kecamatan dan 86 Desa, dan terbagi atas 3 wilayah yaitu: Wilayah Sleman Timur, Sleman Tengah, dan Sleman Barat.

3. Topografi

Kabupaten Sleman keadaan tanahnya dibagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring dan di bagian utara

sekitar Lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan.

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara <100 sd >1000 m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi empat kelas yaitu ketinggian <100 m, 100-499 m, 500-999m, dan > 1000 m dari permukaan laut. Wilayah Kabupaten Sleman termasuk beriklim tropis basah dengan musim hujan antara bulan Nopember-April dan musim kemarau antara bulan Mei-Oktober.

C. KEADAAN PENDUDUK

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2001, jumlah penduduk Sleman tercatat sebesar 862.314 jiwa yang terdiri dari 426.329 laki-laki dan 435.985 perempuan. Dengan luas wilayah sebesar 574,82 km², maka diperoleh kepadatan penduduk sebanyak 1.500 jiwa per km². Beberapa kecamatan yang relatif padat penduduknya adalah Depok dengan 3.136 jiwa per km², Mlati dengan 2.396 jiwa per km² serta Gamping dan Godean dengan masing-masing 2.286 jiwa dan 2.158 jiwa per km².

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Kabupaten Sleman Tahun 2001

Bulan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Januari	420.595	430.433	851.028
2. Februari	421.033	340.791	851.824
3. Maret	421.521	431.318	852.839
4. April	422.256	432.179	854.435
5. Mei	422.813	432.709	855.522
6. Juni	423.333	433.225	856.558
7. Juli	423.937	433.846	857.783
8. Agustus	424.497	434.443	858.940
9. September	424.962	434.855	859.817
10. Oktober	425.465	435.254	860.719
11. November	425.917	435.709	861.626
12. Desember	426.329	435.985	862.314

Sumber: www.Sleman.go.id

Tabel 4.2
Perkembangan Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sleman Tahun 2001

Kecamatan	Mutasi						
	Penduduk awal tahun	Lahir	Datang	Pindah	Mati	Penduduk akhir tahun	Pertambahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Moyudan	33.595	387	178	170	192	33.798	203
2. Minggir	43.562	399	168	224	238	34.667	105
3. Seyegan	42.151	461	183	224	187	42.384	233
4. Godean	57.245	696	542	298	238	57.947	702
5. Gamping	65.789	922	1.092	615	318	66.870	1.081
6. Mlati	67.037	979	1.428	815	283	68.344	10307
7. Depok	109.092	1.289	2.813	1.287	413	111.494	2.402

Kecamatan	Mutasi						
	Penduduk awal tahun	Lahir	Datang	Pindah	Mati	Penduduk akhir tahun	Pertambahan
8. Berbah	40.226	434	305	179	169	40.617	391
9. Prambanan	44.003	491	166	151	200	44.309	306
10. Kalasan	54.621	689	561	331	252	55.288	667
11. Ngemplak	44.382	597	617	243	210	45.143	761
12. Ngaglik	65.927	756	1.557	559	295	67.386	1.459
13. Sleman	55.549	761	464	271	256	56.247	698
14. Tempel	46.386	533	862	435	293	47.053	667
15. Turi	32.544	553	180	153	188	32.936	392
16. Pakem	30.713	358	391	159	195	31.108	395
17. Cangkringan	26.354	363	284	106	172	26.723	369
Jumlah	850.176	10.668	11.791	6.220	4.101	862.314	12.138
Tahun 2000	838.628	10.808	10.076	5.386	3.950	850.176	11.548
Tahun 1999	828.960	9.956	9.831	5.773	4.346	838.628	9.668
Tahun 1998	819.800	9.889	9.368	5.937	4.160	828.960	9.160
Tahun 1997	809.490	9.950	10.074	5.863	3.851	819.800	10.310

Sumber: www.Sleman.go.id

Penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 1990 sebanyak 754.750 jiwa dari tahun 2000 meningkat menjadi 850.176 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,43%, dan angka kepadatan penduduk 1.479 jiwa/km². Menurut registrasi penduduk sampai pertengahan tahun 2001 jumlah penduduk Kabupaten Sleman 856.558 (naik 0,84%) yang terdiri dari 423.333 jiwa penduduk laki-laki dan 433.225 jiwa penduduk wanita. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun diupayakan untuk dikendalikan. Pada tahun 2000 pertumbuhan penduduk Sleman sebesar 0,1078%/tahun, menurun 0,6722% dibanding tahun sebelumnya.

Kepadatan penduduk Kabupaten Sleman rata-rata 1.490 orang per km². Kepadatan penduduk yang tertinggi terdapat di Kecamatan Depok yakni 3.102

orang per km². Sedangkan kepadatan penduduk yang paling rendah terdapat di Kecamatan Cangkringan yakni hanya 554 orang per km².

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman tergolong sangat tinggi dibanding pertumbuhan penduduk kabupaten lain di DIY. Migrasi masuk lebih besar dibanding migrasi keluar yang merupakan konsekuensi Sleman sebagai tujuan pendidikan yang mengakibatkan pesatnya pertumbuhan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Sleman.

D. AGAMA

Kerukunan kehidupan intern umat dan antar umat beragama di Kabupaten Sleman dalam kondisi baik dan terkendali, toleransi antar umat beragama dan rasa kegotongroyongan diantara umat di Kabupaten Sleman, menjadi salah satu kunci kestabilan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sleman.

Tabel 4.3
Komposisi Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Sleman

Jenis Agama	%
Islam	91,29
Katolik	6,24
Kristen	2,28
Hindu	0,12
Budha	0,07

Sumber: www.Sleman.go.id

Tabel 4.4
Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Jenisnya di Kabupaten Sleman
Tahun 2000/2001

Kecamatan	Pemeluk Agama						Jumlah
	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Moyudan	28.291	4.871	494	-	1	-	33.657
2. Minggir	25.986	7.811	892	4	2	-	34.695
3. Seyegan	40.886	982	134	45	2	-	42.049
4. Godean	53.523	2.287	2.294	13	5	-	58.122
5. Gamping	62.729	2.509	2.851	46	29	-	68.164
6. Mlati	60.304	4.965	2.804	130	136	-	68.339
7. Depok	98.871	6.348	4.833	468	323	-	110.843
8. Berbah	37.562	2.069	943	25	19	-	40.618
9. Prambanan	41.417	2.266	312	13	-	-	44.208
10. Kalasan	50.877	3.134	788	100	11	-	54.910
11. Ngemplak	42.168	2.034	748	52	74	-	45.076
12. Ngaglik	60.658	3.940	1.726	89	33	-	66.446
13. Sleman	51.138	3.236	501	6	1	-	54.882
14. Tempel	45.487	799	109	4	2	-	46.401
15. Turi	27.460	2.222	55	2	-	-	29.739
16. Pakem	25.898	3.821	725	6	15	-	30.465
17. Cangkringan	24.476	152	134	2	-	-	24.764
Jumlah	777.931	53.466	20.343	1.005	653	-	853.378

Sumber: www.Sleman.go.id

E. PEMERINTAHAN

Pemerintahan Kabupaten Sleman dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati. Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, hingga bulan Desember 2001 di lingkungan Pemda Kabupaten Sleman terdapat 14.218 PNS yang terdiri dari 6.255 (43,99%) PNS wanita dan 7.963 (56,01%) PNS laki-laki. Dari jumlah PNS yang ada, rasio

pegawai terhadap jumlah penduduk 1: 60,24 artinya seorang pegawai melayani 60,24 jiwa penduduk.

Latar belakang pendidikan PNS terdiri dari S2 sebanyak 36 orang atau 0,25%, S1 sebanyak 2.535 orang atau 17,83%, Diploma sebanyak 40.867 orang atau 34,23%, SLTA sejumlah 5.665 orang atau 39,84%, SLTP sebanyak 589 orang atau 4,14%, SD sebanyak 526 orang atau 3,70%.

Sedangkan jumlah pejabat fungsional sampai dengan bulan Desember 2001 sebanyak 10.482 yang terdiri dari guru TK 490 orang, guru SD 4.216 orang, guru SMU 1.024 orang, guru SMK 866 orang, guru SLB 173 orang, pengawas 47 orang, tenaga fungsional medis 783 orang, pustakawan 4 orang, arsiparis 16 orang, penyuluh pertanian 138 orang, penyuluh kehutanan 18 orang, dan penyuluh perindustrian 2 orang.

Tabel 4.5
Jumlah Pegawai Otonomi Daerah Menurut
Instansi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman

No	Nama Instansi	Pria	Wanita	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	144	96	240
2	Sekretariat Dewan	26	9	35
3	Kantor Kepegawaian Daerah	38	24	62
4	Kantor Data Elektronik, Arsip dan Perpustakaan	14	15	29
5	Kantor Dampak Lingkungan	23	7	30
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	134	72	206
7	Badan Pengawasan Daerah	30	29	59
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	49	25	74
9	Dinas Kesejahteraan Masyarakat	151	72	223

No	Nama Instansi	Pria	Wanita	Jumlah
10	Dinas Kesehatan	358	755	1.113
11	Dinas Ketentraman dan Ketertiban	122	48	170
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.395	4.744	10.139
13	Dinas Pertanian dan Kehutanan	322	100	422
14	Dinas Perekonomian	112	50	162
15	Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertambangan	566	57	623
16	Kecamatan Berbah	30	5	35
17	Kecamatan Cangkringan	24	4	28
18	Kecamatan Depok	35	2	37
19	Kecamatan Gamping	29	11	40
20	Kecamatan Godean	26	9	35
21	Kecamatan Kalasan	28	9	37
22	Kecamatan Moyudan	31	2	33
23	Kecamatan Minggir	26	10	36
24	Kecamatan Mlati	32	13	45
25	Kecamatan Ngaglik	25	15	40
26	Kecamatan Ngemplak	24	7	31
27	Kecamatan Pakem	27	10	37
28	Kecamatan Prambanan	33	5	38
29	Kecamatan Seyegan	26	13	39
30	Kecamatan Sleman	26	20	46
31	Kecamatan Tempel	31	12	43
32	Kecamatan Turi	26	5	31
JUMLAH		7.963	6.255	14.218

Sumber: www.Sleman.go.id

BAB V

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Ditinjau dari Rasio Kemandirian

1. Menghitung Rasio Kemandirian

- a. Menjumlahkan komponen-komponen realisasi pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahun

Tabel 5.1
Perkembangan Realisasi PAD Kab. Sleman Tahun 2001-2003
(dalam rupiah)

No	Pendapatan Asli Daerah	2001	2002	2003
1.	Pajak	16.069.014.396,26	22.094.977.769,96	24.907.210.488,00
2.	Retribusi	8.268.612.581,75	10.225.900.071,44	14.256.963.201,75
3.	Bagian Laba Usaha Daerah	1.743.565.085,30	1.971.054.416,32	2.300.059.065,60
4.	Penerimaan Lain-lain	3.489.961.151,12	4.616.260.510,25	11.514.487.910,15
	Total	29.571.153.214,43	38.908.192.767,97	52.978.731.465,50

Sumber data: BPKKD Kabupaten Sleman (data diolah)

b. Menghitung total pendapatan setiap tahun

Tabel 5.2
Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Kab. Sleman Tahun 2001-2003
(dalam rupiah)

No	Pendapatan	2001	2002	2003
1.	Sisa Lebih Tahun Lalu	9.506.907.139,32	15.301.664.101,87	44.999.641.802,96
2.	PAD	29.571.153.214,43	38.908.192.767,97	52.978.731.465,50
3.	Bagian Dana Perimbangan	256.666.498.264,99	299.961.255.089,58	369.717.141.971,41
4.	Bagian Lain-lain Penerimaan yang Sah	12.787.026.018,35	28.922.587.156,00	30.188.785.569,00
	Total	308.531.584.637,09	383.093.699.115,42	497.884.300.808,87

Sumber data: BPKKD Kabupaten Sleman (data diolah)

c. Membagi pendapatan asli daerah dengan total pendapatan

Tabel 5.3
Rasio Kemandirian Kabupaten Sleman Tahun 2001-2003

Tahun	PAD (Rp.)	Total Pendapatan (Rp.)	Rasio Kemandirian
2001	29.571.153.214,43	308.531.584.637,09	9,58%
2002	38.846.979.981,95	383.093.699.115,42	10,14%
2003	52.978.731.465,50	497.884.300.808,87	10,64%

Sumber data: BPKKD Kabupaten Sleman (data diolah)

d. Pembahasan

Dari tabel 5.3 dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah yang tercermin di dalam PAD masih sangat rendah. Peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Pola hubungan ini disebut dengan pola hubungan instruktif. Meskipun rasio

kemandirian Pemerintah Kabupaten Sleman masih sangat rendah tetapi besarnya PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dari tabel 5.3 dapat diketahui bahwa selama tahun 2001 sampai dengan 2003, besarnya rasio kemandirian berkisar antara 9,58%-10,64%:

1. Pada tahun 2001, rasio kemandirian Kabupaten Sleman sebesar 9,58%.

Pendapatan asli daerah hanya mampu memberi kontribusi sebesar 9,58% atau sebesar Rp. 29.571.153.214,43 terhadap total pendapatan yaitu sebesar Rp. 308.531.584.637,09 (lampiran IV halaman 82). Pada tahun ini kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sleman masih sangat rendah yang berarti tidak mampu untuk melakukan otonomi. Total pendapatan Kabupaten Sleman pada tahun ini sebagian besar berasal dari komponen bagian dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 256.666.498.264,99 (83,19%) dari total pendapatan.

2. Pada tahun 2002, rasio kemandirian Kabupaten Sleman meningkat menjadi 10,14%. Pendapatan asli daerah mampu memberikan kontribusi sebesar 10,14% atau sebesar Rp. 38.46.979.981,95 terhadap total pendapatan yaitu sebesar Rp. 383.093.699.115,42 (lampiran IV halaman 83). Meskipun kemampuan keuangan daerah pada tahun ini masih sangat rendah namun rasio kemandirian pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 1,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Total pendapatan Kabupaten Sleman pada tahun ini sebagian besar juga berasal dari bagian dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 299.961.255.089,58 (78,30%) dari total pendapatan.

3. Pada tahun 2003, rasio kemandirian Kabupaten Sleman meningkat menjadi 10,64%. Meskipun mengalami peningkatan, namun besarnya peningkatan rasio kemandirian pada tahun 2003 lebih kecil dibandingkan dengan besarnya peningkatan yang terjadi pada tahun 2002. Pada tahun 2003, pendapatan asli daerah mampu memberikan kontribusi sebesar 10,64% atau sebesar Rp. 52.978.731.465,50 terhadap total pendapatan yaitu sebesar Rp. 497.884.300.808,87 (lampiran IV halaman 84). Kemampuan keuangan daerah pada tahun ini masih sangat rendah dengan kenaikan sebesar 0,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Total pendapatan Kabupaten Sleman pada tahun ini sebagian besar juga berasal dari bagian dana perimbangan yaitu Rp. 369.717.141.971,41 (74,26%) dari total pendapatan.

2. Perkembangan Rasio Kemandirian Kabupaten Sleman

Untuk mengetahui perkembangan rasio kemandirian digunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan trend, dengan rumus:

$$Y' = a + bX$$

Tabel 5.4
Tabel Trend Rasio Kemandirian Kabupaten Sleman Tahun 2001-2003

Tahun	Rasio Kemandirian (Y)	X	XY	X ²	Y'
2001	9,58%	-1	-9,58%	1	9,59
2002	10,14%	0	0	0	9,88
2003	10,64%	1	10,64	1	10,77
Total	30,36%	0	1,06	2	

Sumber data: BPKKD Kabupaten Sleman (data diolah)

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus:

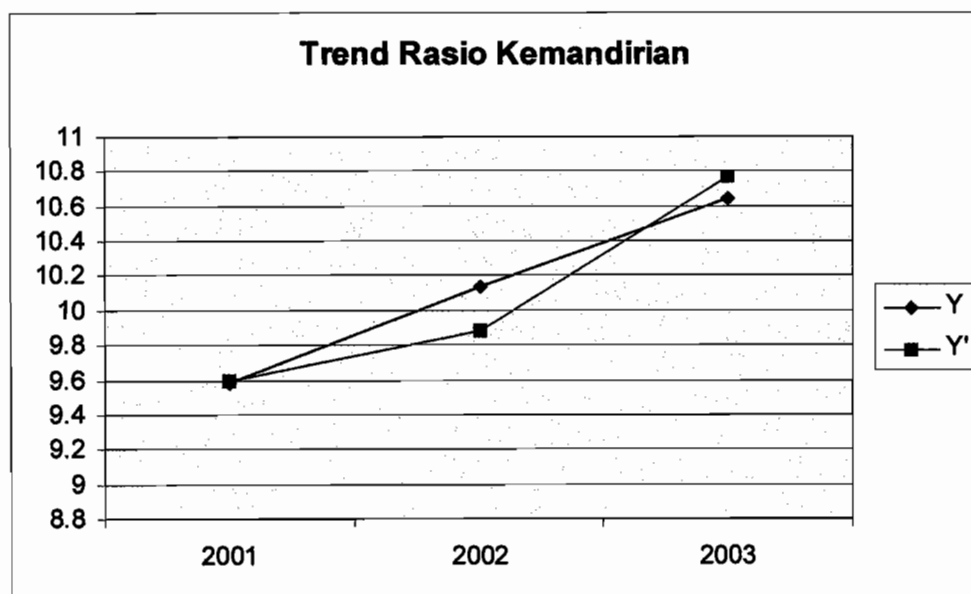
$$a = \frac{\Sigma Y}{n} = \frac{29,65}{3} = 10,12$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2} = \frac{1,77}{2} = 0,53$$

Dari tabel 5.4 dapat diketahui bahwa rasio kemandirian Kabupaten Sleman cenderung meningkat yang berkisar antara 9,59% sampai dengan 10,77%. Dari perhitungan diatas diketahui bahwa rata-rata tingkat kemandirian Kabupaten Sleman untuk setiap tahun adalah 10,12% dan setiap tahun mengalami peningkatan sebesar 0,53%.

Untuk memperjelas tabel trend rasio kemandirian diatas dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 5.1



B. Perkembangan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Ditinjau dari Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.

1. Menghitung Rasio Efektivitas PAD

- a. Menjumlahkan komponen-komponen realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman setiap tahun.(Tabel 5.1)
- b. Menjumlahkan komponen-komponen target penerimaan pendapatan asli daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah setiap tahun.

Tabel 5.5
Perkembangan Target PAD Kab. Sleman Tahun 2001-2003
(dalam rupiah)

No	Pendapatan Asli Daerah	2001	2002	2003
1.	Pajak	14.739.228.092,36	18.399.254.338,95	19.300.000.000,00
2.	Retribusi	7.910.446.500,00	10.180.264.300,00	13.137.761.000,00
3.	Bagian Laba Usaha Daerah	1.262.000.000,00	1.979.360.635,00	2.502.558.000,00
4.	Penerimaan Lain-lain	2.704.463.125,00	4.288.100.708,00	8.553.927.800,00
	Total	26.616.137.717,36	34.846.979.981,95	43.494.246.800,00

Sumber data: BPKKD Kabupaten Sleman (data diolah)

- c. Membagi realisasi pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah

Tabel 5.6
Rasio Efektivitas Kabupaten Sleman Tahun 2001-2003

Tahun	Realisasi PAD (Rp.)	Target PAD (Rp.)	Rasio Efektivitas
2001	29.571.153.214,43	26.616.137.717,36	111,1%
2002	38.908.192.767,97	34.846.979.981,95	111,65%
2003	52.978.731.465,50	43.494.246.800,00	121,8%

Sumber data: BPKKD Kabupaten Sleman (data diolah)

d. Pembahasan

Dari tabel 5.6 dapat diketahui bahwa selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 rasio efektivitas selalu mengalami peningkatan bahkan mampu melampaui target yang ditetapkan.

1. Pada tahun 2001 rasio efektivitas mencapai 111,1% yang berarti bahwa pada tahun tersebut pemungutan PAD sudah efektif karena kontribusi yang diberikan pada tahun itu lebih dari 100% yang berarti melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2001 pemerintah menargetkan PAD sebesar Rp. 26.616.137.717,36 sementara besarnya realisasi PAD pada tahun tersebut sebesar Rp. 29.571.153.214,43 yang berarti ada kelebihan target sebesar Rp. 2.955.015.497,07.
2. Pada tahun 2002 rasio efektivitas mencapai 111,65% yang berarti bahwa pada tahun tersebut pemungutan PAD sudah efektif karena kontribusi yang diberikan pada tahun itu lebih dari 100% yang berarti melebihi target yang ditetapkan. Besarnya target PAD pada tahun 2002 sebesar Rp. 34.846.979.981,95 sementara besarnya realisasi PAD pada tahun tersebut Rp. 38.908.192.767,97 yang berarti ada kelebihan target sebesar Rp. 4.061.212.786,02. Dengan demikian pada tahun 2002 pemerintah semakin efektif dalam menjalankan tugasnya karena besarnya realisasi PAD yang dicapai semakin meningkat.
3. Pada tahun 2003 rasio efektivitas mencapai 121,8% sedangkan pada tahun 2002 sebesar 111,64% yang berarti mengalami peningkatan

sebesar 10,16%. Pada tahun 2003 pemerintah menargetkan PAD sebesar Rp. 43.494.246.800,00 sementara realisasi yang dicapai sebesar Rp. 52.978.731.465,50. Pada tahun ini berarti ada kelebihan target sebesar Rp. 9.484.484.665,50. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dari tahun ke tahun semakin efektif.

2. Perkembangan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Sleman

Untuk mengetahui perkembangan rasio efektivitas digunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan trend, dengan rumus:

$$Y' = a + bX$$

Tabel 5.7
Tabel Trend Rasio Efektivitas Pemungutan PAD Kabupaten Sleman

Tahun	Rasio Efektivitas (Y)	X	XY	X ²	Y'
2001	111,1%	-1	-111,1	1	109,5
2002	111,65%	0	0	0	114,85
2003	121,8%	1	121,8	1	120,2
Total	344,55%	0	10,7	2	

Sumber data: BPKKD Kabupaten Sleman (data diolah)

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus:

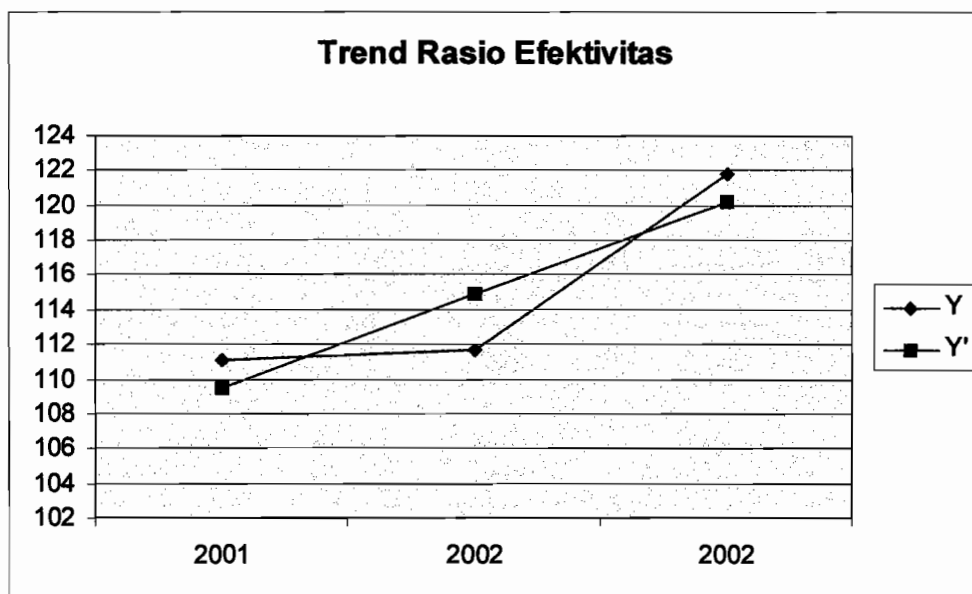
$$a = \frac{\Sigma Y}{n} = \frac{344,55}{3} = 114,85$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2} = \frac{10,7}{2} = 5,35$$

Dari tabel 5.7 dapat diketahui bahwa pemungutan PAD di Kabupaten Sleman cenderung efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target rata-rata setiap tahunnya adalah sebesar 114,85% dengan peningkatan 5,35% setiap tahun. Kinerja pemerintah Kabupaten Sleman cenderung makin membaik dilihat dari peningkatan rasio efektivitas untuk setiap tahunnya.

Untuk memperjelas tabel trend efektivitas di atas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 5.2



3. Menghitung Rasio Efisiensi PAD

- a. Menjumlahkan komponen-komponen biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah setiap tahun.(Lampiran III)
- b. Menjumlahkan komponen-komponen realisasi penerimaan pendapatan asli daerah setiap tahun.

Tabel 5.8
Rasio Efisiensi Kabupaten Sleman Tahun 2001-2003

Tahun	Biaya Pemungutan PAD (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	Rasio Efisiensi
2001	2.124.773.114,16	29.571.153.214,43	7.19%
2002	2.698.597.361,35	38.908.192.767,97	6.94%
2003	2.960.387.226,95	52.978.731.465,50	5.59%

Sumber data: BPKKD Kabupaten Sleman (data diolah)

c. Pembahasan

Dari tabel 5.8 dapat dilihat bahwa selama tahun 2001 hingga tahun 2003 besarnya rasio efisiensi yang dicapai dibawah 100% yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah telah efisien.

1. Pada tahun 2001 rasio efisiensi sebesar 7,19%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD sudah efisien.
2. Pada tahun 2002 nilai efisiensi mengalami penurunan sebesar 0,25% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 6,94%. Penurunan nilai efisiensi ini menunjukkan bahwa pemungutan PAD tahun 2002 lebih efisien jika dibandingkan dengan pemungutan PAD pada tahun 2001.
3. Pada tahun 2003 nilai efisiensi mengalami penurunan sebesar 1,35% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 5,59% yang berarti pemungutan PAD pada tahun tersebut lebih efisien jika dibandingkan tahun sebelumnya.



4. Perkembangan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Sleman

Untuk mengetahui perkembangan rasio efisiensi digunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan trend, dengan rumus:

$$Y' = a + bX.$$

Tabel 5.9
Tabel Trend Rasio Efisiensi Kabupaten Sleman Tahun 2001-2003

Tahun	Rasio Efisiensi (Y)	X	XY	X ²	Y'
2001	7,19%	-1	-7,19	1	7,73
2002	6,94%	0	0	0	6,57
2003	5,59%	1	5,59	1	5,77
Total	19,72%	0	-1,6	2	

Sumber data: BPKKD Kabupaten Sleman (data diolah)

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus:

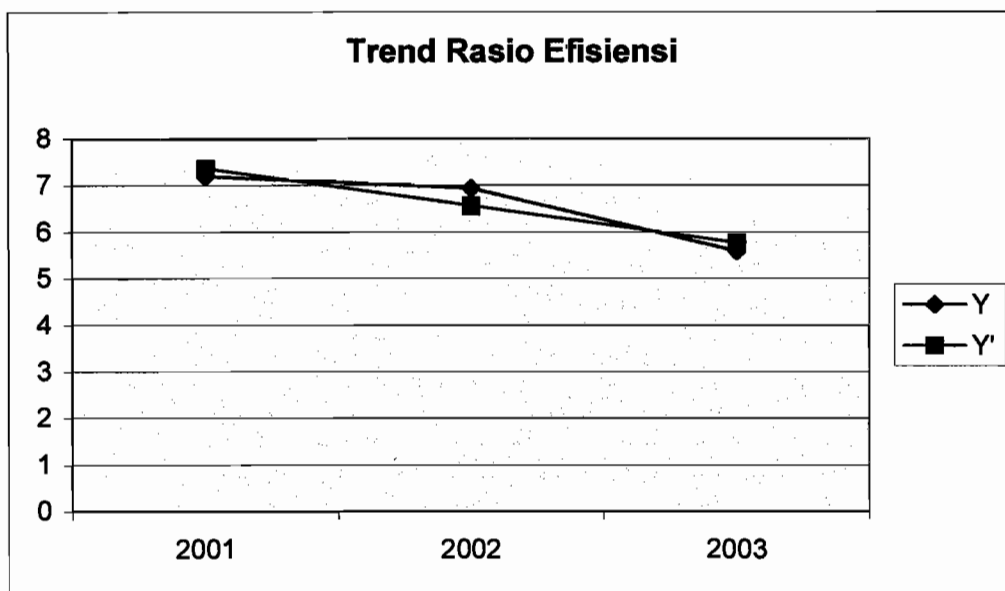
$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{19,72}{3} = 6,57$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-1,6}{2} = -0,8$$

Dari tabel 5.9 di atas dapat diketahui bahwa biaya pemungutan PAD cenderung efisien karena rasio efisiensi kurang dari 100% yaitu rata-rata setiap tahun sebesar 6,57%. Pemungutan PAD pada tiap tahun semakin efisien yang ditandai dengan menurunnya persentase nilai efisiensi pemungutan PAD sebesar 0,8%.

Untuk memperjelas tabel trend rasio efisiensi di atas dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 5.3



C. Perkembangan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Ditinjau dari Rasio Pertumbuhan

1. Menghitung pertumbuhan dari masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran

Tabel 5.10
Rasio Pertumbuhan Kabupaten Sleman Tahun 2001-2003
(dalam rupiah)

No	Keterangan	2001	2002	2003
1.	PAD	29.571.153.214,43	38.908.192.767,97	52.978.731.465,50
2.	Pertumbuhan PAD	-	31,57%	36,16%
3.	Total Pendapatan	308.531.584.637,09	383.093.699.115,42	497.884.300.808,87
4.	Pertumbuhan Total Pendapatan	-	24,16%	29,96%
5.	Belanja Rutin	255.059.197.382,72	-	-
6.	Pertumbuhan Belanja Rutin	-	-	-
7.	Belanja Pembangunan	38.170.723.152,50	-	-
8.	Pertumbuhan Belanja Pembangunan	-	-	-
9.	Belanja Administrasi Umum	-	81.779.980.739,65	287.399.615.187,43
10.	Pertumbuhan Belanja Administrasi Umum	-	-	251,43%
11.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	-	215.367.510.590,39	60.019.617.791,15
12.	Pertumbuhan Belanja Operasi dan Pemeliharaan	-	-	(72,13%)
13.	Belanja Modal	-	24.917.258.739,42	78.242.737.612,05
14.	Pertumbuhan Belanja Modal	-	-	214,01%
15.	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	-	14.720.307.243,00	18.445.065.965,00
16.	Pertumbuhan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	-	-	25,30%

No	Keterangan	2001	2002	2003
17.	Belanja Tidak Tersangka	-	1.309.000.000,00	3.403.523.250,00
18.	Pertumbuhan Belanja Tidak Tersangka	-	-	160,01%

2. Pembahasan

Dari perhitungan rasio tabel 5.10 di atas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan APBD Kabupaten Sleman pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 menunjukkan pertumbuhan dan cenderung meningkat.

Pada komponen PAD tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 peningkatan sebesar 31,57% atau sebesar Rp. 9.337.039.553,54. Tahun anggaran 2002 sampai 2003 mengalami peningkatan sebesar 36,16% atau sebesar Rp. 14.070.538.697,53.

Pada komponen total pendapatan tahun 2001 sampai dengan 2002 mengalami peningkatan sebesar 24,16% atau sebesar Rp. 82.431.414.615,33. Tahun anggaran 2002 sampai 2003 mengalami peningkatan sebesar 29,96% atau sebesar Rp.114.790.601.693,45.

Pada komponen belanja rutin dan belanja pembangunan tidak dapat dilakukan analisa karena komponen belanja rutin dan belanja pembangunan sudah tidak digunakan lagi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2002 dan tahun 2003 dan diganti dengann belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta belanja tak tersangka..

Pada komponen belanja administrasi umum tahun 2002 sampai dengan 2003 mengalami pertumbuhan sebesar 251,43% atau sebesar Rp. 205.620.634.447,78.

Pada komponen belanja operasi dan pemeliharaan tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 72,13% atau sebesar Rp. 155.347.892.799,24.

Pada komponen belanja modal tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 mengalami pertumbuhann sebesar 214,01% atau sebesar Rp. 53.325.478.873,63.

Pada komponen belanja bagi hasil dan bantuan keuangan tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 mengalami pertumbuhan sebesar 25,30% atau sebesar Rp. 3.724.758.722,00.

Pada komponen belanja tak tersangka tahun 2002 sampai tahun 2003 mengalami pertumbuhan sebesar 160,01% atau sebesar Rp. 2.094.523.250,00.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian Kabupaten Sleman yang diukur melalui Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai rata-rata sebesar 10,12% untuk setiap tahun dengan peningkatan sebesar 0,53% tiap tahun. Kondisi ini berarti bahwa bila ditinjau dari kemampuan keuangan daerahnya maka Kabupaten Sleman belum mampu melaksanakan otonomi daerah. Kabupaten Sleman mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
2. Rasio efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 mencapai rata-rata sebesar 114,85% dengan peningkatan sebesar 5,35% tiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman telah efektif karena kontribusi yang diberikan telah melebihi target. Sedangkan rasio efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 mencapai rata-rata sebesar 6,57%. Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah cenderung efisien karena rasio

efisiensi kurang dari 100%. Terjadinya penurunan nilai efisiensi sebesar 0,8% menunjukkan bahwa pemungutan Pendapatan Asli Daerah semakin efisien pada setiap tahun.

3. Rasio pertumbuhan APBD pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada komponen belanja operasi dan pemeliharaan yang mengalami penurunan sebesar 72,13%.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

1. Penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang sangat terbatas yaitu hanya berlaku pada Pemerintah Daerah yang diteliti.
2. Bentuk dan susunan perhitungan APBD yang berubah-ubah setiap tahun menimbulkan kesulitan dalam mencari data tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena pemerintah sedang berada dalam proses penyusunan perhitungan APBD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Belum adanya ukuran yang pasti mengenai batasan rasio efektivitas sehingga penulis menarik kesimpulan hanya berdasarkan pendapat bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%.
4. Untuk menentukan efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah belum ada standar yang pasti sehingga penulis hanya berdasarkan pendapat bahwa kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan

Pendapatan Asli Daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%.

C. SARAN

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Sleman mempertahankan efektivitas dan efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah efektif dan efisien serta berusaha untuk terus meningkatkannya.

Cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan melakukan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah yaitu memperbesar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Selain itu dapat pula dilakukan ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak atau retribusi daerah. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat diperoleh bila pemerintah melakukan pembangunan-pembangunan baru, seperti pembangunan pasar dan terminal.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas pembahasan dengan melakukan penilaian kemampuan pinjaman dengan menghitung besarnya *debt service coverage ratio (DSCR)* yaitu perbandingan antara penjumlahan

pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya, serta dana alokasi umum, setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Besarnya DSCR ditentukan $>2,5$ yang berarti dengan jumlah perbandingan 2,5 diharapkan pinjaman yang dilakukan tetap dapat dibayarkan oleh daerah tersebut atau dengan kata lain *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* merupakan ambang batas pelunasan pinjaman yang aman untuk mengendalikan besarnya pinjaman yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

2. Peneliti selanjutnya dapat pula menghitung besarnya rasio aktivitas yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Namun belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

3. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian sejenis namun dengan membandingkan kinerja dua pemerintah daerah yang berbeda yang mempunyai kondisi hampir sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 1997. *Statistika Ekonomi*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Blocher, Edward J, Kung H. Chen & Thomas W. Lin. 1999. *Cost Management-a Strategic Emphasis*. International Edition. Boston: Irwin Mac Graw-Hill.
- Boedijoewono, Noegroho. 1999. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSKK-UGM.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Krismiastuti, Cicilia. 2001. Pengukuran Kinerja Manajemen dengan Pendekatan Balanced Scorecard pada Sriwedari Hotel & Cottage. *Skripsi*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi. 1993. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Nadeak, Ruslina. 2003. Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Purwanto, Suharyadi. 2003. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.

Subardi, Agus. 1994. *Manajemen Keuangan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Syafaruddin, Alwi. 1989. *Alat-Alat Analisis Dalam Pembelanjaan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Wajong, J. 1962. *Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: ICHTIAR.

www.Sleman.go.id

LAMPIRAN

LAMPIRAN I: SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasaniya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda / 1493 / 2005

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Ketua Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Nomor: 31/Kaprodi Akt/342/IX/2005 Tanggal : 05 September 2005 Hal : Permohonan Ijin Penelitian.

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : MURYANI
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 012114078
Program/ Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : U S D Yogyakarta
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Mrican Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Gandaria 8 C Jambusari Indah Wedomartani Ngemplak Sleman
Untuk : Melakukan Penelitian dengan judul :
"PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN ANALISA RASIO KEUANGAN LAPORAN PERHITUNGAN APBD"
Lokasi : Bappeda, BPKKD dan BPS Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 14 September 2005 s.d 14 Desember 2005

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
4. Izin tidak disulutkan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

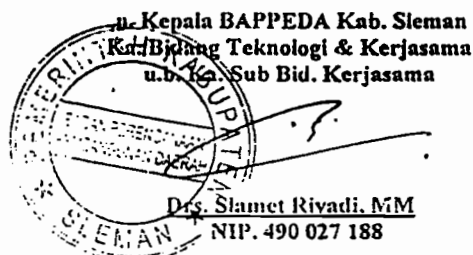
Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 14 September 2005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. Bappeda Kab. Sleman
4. Ka. BPKKD Kab. Sleman
5. Ka. Bawasda Kab. Sleman
6. Ka. BPS Kab. Sleman
7. Ka. Sekretaris Bappeda Kab. Sleman
8. Ka. Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Sleman
9. Ketua Program Studi-USD
10. Peringgal.



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN TENTANG LAPORAN
PERHITUNGAN APBD



BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 12 /Kep.KDH/A/2002.

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 3693);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1993;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

26. Keputusan Bupati Sleman Nomor 02/Kep.KDH/2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan, dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
27. Keputusan Bupati Sleman Nomor 44/Kep.KDH/2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan, dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sebagai berikut:

- a. Perhitungan anggaran pendapatan.... Rp308.531.584.637,09.
- b. Perhitungan anggaran belanja:
 1. Rutin sebesar.....Rp255.059.197.362,72.
 2. Pembangunan sebesar...Rp 38.170.723.152,50.
 -Rp293.229.920.535,22.
- c. Sisa perhitungan anggaran:

Pendapatan dan belanja daerah berlebih

.....Rp 15.301.664.101,87.

Pasal 2

Penerimaan perhitungan anggaran pendapatan tahun anggaran 2001 sebesar Rp308.531.584.637,09.

Pasal 3

Jumlah pengeluaran perhitungan anggaran pendapatan tahun anggaran 2001 sebesar Rp293.229.920.535,22.

Pasal 4

- (1) Pengeluaran perhitungan belanja rutin tahun anggaran 2001 sebesar Rp255.059.197.382,72.
- (2) Pengeluaran perhitungan belanja pembangunan tahun anggaran 2001 sebesar Rp36.170.723.152,50.

Pasal 5

Penerimaan dan pengeluaran perhitungan urusan kas dan perhitungan Tahun Anggaran 2001 sebagai berikut:

Perhitungan urusan kas dan perhitungan :

- a. Pendapatan sebesar Rp 24.696.056.604,00.
- b. Belanja:
 1. Rutin sebesar..... Rp20.176.444.626,00.
 2. Pembangunan sebesar..... Rp -
 - Rp 20.176.444.626,00.
- c. Sisa perhitungan urusan kas dan perhitungan sejumlah
 Rp 4.519.611.978,00.

Pasal 6

- (1) Uraian realisasi dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan dalam C/I Lampiran I.
- (2) Uraian realisasi dari kegiatan/pasal belanja rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 4 dijabarkan dalam C//R Lampiran II.
- (3) Uraian realisasi dari proyek belanja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 4 dijabarkan dalam C//P Lampiran III.

Pasal 7

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

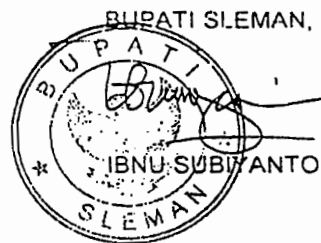
Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal : 26-3-2002



Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal : 26-3-2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI A



BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 07 /Kep.KDH/A/2003

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan maksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor Tahun 2003 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001,

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985, tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-C/99 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 1993;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Sleman;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002;

26. Keputusan Bupati Sleman Nomor 08/Kep.KDH/B/2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
27. Keputusan Bupati Sleman Nomor 32/Kep.KDH/A/2002 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 sebagai berikut:

- a. Perhitungan anggaran

Pendapatan sebesar	Rp 383.093.699.115,42
--------------------------	-----------------------
- b. Perhitungan anggaran belanja:
 1. Administrasi umum

sebesar	Rp 81.779.980.739,65
---------------	----------------------
 2. Operasi dan pemeliharaan sarana prasarana publik

sebesar	Rp 215.367.510.590,39
---------------	-----------------------
 3. Investasi sebesar
 Rp 24.917.258.739,42 |
 4. Transfer sebesar
 Rp 14.720.307.243,00 |
 5. Tak Tersangka sebesar
 Rp 1.309.000.000,00 |
| Jumlah | Rp 338.094.057.312,46 |
- c. Sisa perhitungan anggaran :

Pendapatan dan belanja daerah berlebih	
sebesar	Rp 44.999.641.802,96

Pasal 2

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagian urusan kas dan perhitungan Tahun Anggaran 2002 sebagai berikut:

- a. Pendapatan sebesar
 Rp 32.564.356.741,00 |
- b. Belanja sebesar
 Rp 32.555.599.941,00 |
- c. Sisa perhitungan urusan kas

dan perhitungan sebesar	<u>Rp 8.756.800,00</u>
-------------------------------	------------------------

Pasal 2

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagian urusan kas dan perhitungan Tahun Anggaran 2002 sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan sebesar | Rp 32.564.356.741,00 |
| b. Belanja sebesar | Rp 32.555.599.941,00 |
| c. Sisa perhitungan urusan kas
dan perhitungan sebesar..... | Rp <u>8.756.800,00</u> |

Pasal 3

- (1) Uraian realisasi dari Perhitungan anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dijabarkan dalam Lampiran I.
- (2) Uraian realisasi dari Perhitungan anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf b dijabarkan dalam Lampiran II.

Pasal 4

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

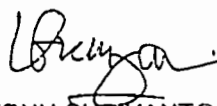
Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 8 Maret 2003

BUPATI SLEMAN


IBNU SUBIYANTO



BUPATI SLEMAN



KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 13/Kep.KDH/A/2004

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001, Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri E);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003, Nomor 1, Seri A);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 10 Seri 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004, Nomor 3, Seri A);
8. Keputusan Bupati Sleman Nomor 06/Kep.KDH//J/2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
9. Keputusan Bupati Sleman Nomor 17/SK.KDH/A/2003 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut:

a. Realisasi anggaran pendapatan:

1. Pendapatan asli daerah.....	Rp 52.978.731.463,50
2. Dana perimbangan.....	Rp 369.717.141.971,41
3. Lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp 30.188.785.569,00</u>
Jumlah perhitungan pendapatan	Rp 452.884.659.005,91

b. Realisasi anggaran belanja:

1. Aparatur daerah

a) belanja administrasi umum	Rp 70.262.750.431,93
b) belanja operasi dan pemeliharaan ..	Rp 30.985.762.210,95
c) belanja modal	<u>Rp 37.201.529.287,93</u>

Jumlah perhitungan belanja aparatur

daerah Rp 138.450.041.930,86

2. Pelayanan publik

a) belanja administrasi umum	Rp 217.136.864.755,50
b) belanja operasi dan pemeliharaan ..	Rp 29.033.855.580,20
c) belanja modal	Rp 41.041.208.324,07
d) belanja bagi hasil dan bantuan keuangan	Rp 18.445.065.965,00
e) belanja tidak tersangka	<u>Rp 3.403.523.250,00</u>

Jumlah perhitungan belanja pelayanan

publik Rp 309.060.517.874,77

Jumlah belanja Rp 447.510.559.805,33

Surplus Rp 5.374.099.200,28

c. Realisasi anggaran pembiayaan

1. Penerimaan daerah	Rp 44.999.641.802,96
2. Pengeluaran daerah	Rp -
Jumlah pembiayaan	<u>Rp 44.999.641.802,96</u>

d. Sisa Perhitungan Tahun Anggaran 2003. Rp 50.373.741.003,24

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal : 25 Maret 2004



Diundangkan di Kabupaten Sleman

Pada tanggal : 25 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI A

LAMPIRAN III: BIAYA PEMUNGUTAN PAD TAHUN 2001-2003**Biaya Pemungutan PAD tahun 2001**

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1.	Insentif	770.960.482,70
2.	Pendaftaran dan pendataan wajib pajak	17.500.000,00
3.	Pemungutan pajak	74.569.550,00
4.	Penyampaian SPPT PBB	97.967.800,00
5.	Pemeriksaan PHR	14.000.000,00
6.	Pemeriksaan pajak hiburan/insidentil	4.654.000,00
7.	Operasional PHR kaliurang	1.200.000,00
8.	Pengembalian PHR kepada WP	75.000.000,00
9.	Pengembalian pajak reklame	50.874.316,73
10.	Biaya pungut PBB	843.869.606,00
11.	Pengembalian pondokan 30%	5.038.542,00
12.	Operasional reklame paket I	50.874.316,73
13.	Operasional mantri pasar	3.240.000,00
14.	Operasional staf pasar	9.405.000,00
15.	Bantuan keamanan pasar	5.310.000,00
16.	Survey, pemantauan, penataan dan administrasi parkir	2.000.000,00
17.	Sewa tanah pasar	22.784.500,00
18.	Honorarium petugas juru pungut pasar	75.525.000,00
	Total	2.124.773.114,16

Biaya Pemungutan PAD tahun 2002

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1.	Insentif	1.008.867.090,35
2.	Akuntan publik	75.000.000,00
3.	Pendaftaran dan pendataan wajib pajak	20.000.000,00
4.	Operasional makan petugas pajak/retribusi	20.000.000,00
5.	Pemungutan pajak	80.000.000,00
6.	Penyampaian SPPT PBB	99.241.440,00
7.	Pemeriksaan PHR	15.000.000,00
8.	Pemeriksaan pajak hiburan/insidentil	5.460.000,00
9.	Operasional PHR kaliurang	2.000.000,00
10.	Pengembalian PHR kepada WP	89.685.000,00
11.	Pengembalian pajak reklame	2.208.440,00
12.	Biaya pungut PBB	915.178.379,00
13.	Intensifikasi PBB	244.236.012,00
14.	Pengalihan basis data PBB	59.761.000,00
15.	Biaya penelitian IMB	41.035.000,00
16.	Biaya penyuluhan IMB	4.450.000,00
17.	Biaya penelitian IMB	7.500.000,00
18.	Biaya Penghitungan pajak BGGC & ABT	8.975.000,00
	Total	2.698.597.361,35

Biaya Pemungutan PAD tahun 2003

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1.	Insentif	1.168.691.491,95
2.	Intensifikasi PAD Pariwisata	3.600.000,00
3.	Pengembalian penerimaan retribusi dan operasional pemungut retribusi kawasan wisata	43.274.500,00
4.	Operasional pasar	15.750.000,00
5.	Intensifikasi retribusi pasar	10.360.000,00
6.	Pembinaan petugas pasar dan paguyuban	2.085.000,00
7.	Pembuatan daftar tunggakan pajak daerah	15.840.000,00
8.	Penerbitan surat himbauan dan teguran pajak	15.840.000,00
9.	Pencatatan realisasi pajak daerah	15.840.000,00
10.	Pemanggilan wajib pajak yang belum membayar pajak	6.660.000,00
11.	Penagihan pajak daerah	91.720.000,00
12.	Perhitungan pajak daerah	22.897.500,00
13.	Penerbitan ketetapan pajak daerah	27.420.000,00
14.	Pendataan wajib pajak	185.345.000,00
15.	Pendaftaran calon wajib pajak	84.290.000,00
16.	Biaya pungut PBB	1.023.009.335,00
17.	Pendataan dan pemeliharaan basis data PBB	24.780.000,00
18.	Honorarium panitia bagi hasil pajak	24.945.000,00
19.	Monitoring pajak	14.130.000,00
20.	Pembinaan wajib pajak	11.520.000,00
21.	Pengkajian PAD	26.400.000,00
22.	Evaluasi PAD	14.025.000,00
23.	Pengkajian NJOP PBB	3.895.000,00
24.	Penyampaian SPPT PBB	100.319.400,00
25.	Intensifikasi IMB	4.000.000,00
26.	Pelatihan pembukuan bagi WP hotel dan restoran	2.970.000,00
	Total	2.960.387.226,95

LAMPIRAN IV: PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2001-2003

Komponen Pendapatan Asli Daerah tahun 2001

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1.	Pajak	16.069.014.396,26
	- Pajak hotel dan restoran	8.276.825.807,29
	- Pajak hiburan	577.864.878,95
	- Pajak penerangan jalan	5.281.316.800,00
	- Pajak pengambilan dan pengolahan BGG C	206.007.630,00
	- Pajak pemanfaatan ABT dan air permukaan	1.169.079.653,66
2.	Retribusi	8.268.612.518,75
	- Retribusi pelayanan kesehatan	4.253.981.732,00
	- Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	186.498.200,00
	- Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil	257.142.250,00
	- Retribusi parkir di tepi jalan umum	204.196.330,00
	- Retribusi pasar	1.115.417.900,00
	- Retribusi pengujian kendaraan bermotor	173.679.900,00
	- Retribusi penggunaan kekayaan daerah	42.110.300,00
	- Retribusi terminal	105.101.400,00
	- Retribusi rumah potong hewan	17.113.250,00
	- Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	592.373.237,50
	- Retribusi penjualan produksi usaha daerah	227.095.000,00
	- Retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah	90.900.872,25
	- Retribusi IMB	752.999.210,00
	- Retribusi ijin gangguan	274.168.000,00
	- Retribusi ijin trayek	2.835.000,00
3.	Bagian Laba Usaha Daerah	1.743.565.085,00
	- Bank pembangunan daerah	1.018.116.635,30
	- Perusahaan bank pasar	725.448.450,00
4.	Penerimaan Lain-Lain	3.489.961.151,12
	- Hasil penjualan barang milik daerah	154.600.963,00
	- Jasa giro	483.941.001,00
	- Sumbangan pihak ketiga	12.500.000,00
	- Setoran kelebihan dari pembayaran hasil pemeriksaan	109.571.334,72
	- Penerimaan penguatan modal	696.120.000,00
	- Lain-lain pendapatan	2.033.227.852,40

Komponen Pendapatan Asli Daerah tahun 2002

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1.	Pajak	22.094.977.769,96
	- Pajak hotel dan restoran	10.023.329.793,42
	- Pajak hiburan	658.988.493,25
	- Pajak reklame	832.927.225,91
	- Pajak penerangan jalan	9.810.399.740,00
	- Pajak pengambilan dan pengolahan BGG C	82.320.840,00
	- Pajak pemanfaatan ABT dan air permukaan	687.011.677,38
2.	Retribusi	10.225.900.071,44
	- Retribusi pelayanan kesehatan	4.938.291.562,00
	- Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	199.080.050,00
	- Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil	394.271.700,00
	- Retribusi parkir di tepi jalan	207.745.210,00
	- Retribusi pasar	1.159.727.225,00
	- Retribusi pengujian kendaraan bermotor	448.121.500,00
	- Retribusi pemakaian kekayaan daerah	94.679.700,00
	- Retribusi terminal	162.675.250,00
	- Retribusi rumah potong hewan	33.520.075,00
	- Retribusi tempat rekreasi dan olah raga	634.104.103,00
	- Retribusi penjualan produk usaha daerah	202.767.900,00
	- Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah	648.062.838,44
	- Retribusi IMB	771.955.958,00
	- Retribusi ijin gangguan	324.367.000,00
	- Retribusi ijin trayek	6.530.000,00
3.	Bagian Laba Perusahaan Daerah	1.971.054.416,32
	- Bagian laba bank pembangunan daerah	1.149.942.653,00
	- Bagian laba perusahaan daerah	821.111.763,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	4.616.260.510,25
	- Hasil penjualan barang milik daerah	31.881.000,00
	- Jasa giro	475.817.389,00
	- Sumbangan pihak ketiga	1.250.000,00
	- Penerimaan kembali penguatan modal	1.087.703.000,00
	- Lain-lain pendapatan	3.019.609.121,25

Komponen Pendapatan Asli Daerah tahun 2003

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1.	Pajak	24.907.210.488,00
	- Pajak hotel	8.501.434.639,99
	- Pajak restoran	1.982.498.736,61
	- Pajak hiburan	587.364.697,21
	- Pajak reklame	1.614.415.777,55
	- Pajak penerangan jalan	11.831.921.870,00
	- Pajak pengambilan BGG C	251.510.377,50
	- Pajak parkir	89.691.605,00
	- Pajak air bawah tanah	48.372.784,14
2.	Retribusi	14.256.964.201,75
	- Bidang Administrasi Umum Sekretariat Pemda	1.757.069.185,00
	- Bidang Umum Pemerintahan BPKKD	1.538.200,00
	- Bidang Umum Pemerintahan Dinas Ketentraman dan Ketertiban	403.355.000,00
	- Bidang Pertanian, Bidang Perikanan, Bidang Perikanan dan Kelautan, Bidang Kehutanan dan Perkebunan	139.721.150,00
	- Bidang Pertambangan dan Energi, Penataan Ruang, Pemukiman dan Pertambangan	2.808.469.758,00
	- Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Penanaman Modal, Bidang Kepariwisata	1.942.399.894,75
	- Bidang Ketenagakerjaan, Sosial dan Kependudukan Dinas Kesejahteraan Masyarakat	517.257.350,00
	- Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan	1.815.210.830,00
	- Bidang Kesehatan RSUD Daerah	4.871.891.834,00
3.	Bagian Laba Usaha Daerah	2.300.059.065,00
	- Bagian laba lembaga keuangan bank	2.268.059.065,60
	- Bagian laba lembaga keuangan non bank	32.000.000,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	11.514.499.910,15

MURYANI

Alamat: Jl. Gandaria 8C Jambusari Indah
Wedomartani, Ngemplak, Sleman
Yogyakarta



Email : yani_muryani@yahoo.com

Phone : [REDACTED]

Data pribadi	Tempat, tanggal lahir	: Klaten, 16 Juli 1983
	Jenis kelamin	: Perempuan
	Agama	: Katolik
	Status	: Belum kawin
	Tinggi/Berat	: 159 cm/ 45 kg
Pendidikan	1989-1995	: SDN Karangasem
	1995-1998	: SLTPN 1 Depok
	1998-2001	: SMUN 1 Depok
	2001-2005	: Universitas Sanata Dharma
	2004-sekarang	: English Extension Course
Universitas	Sanata Dharma	
Pengalaman berorganisasi	UKM Karawitan Universitas Sanata Dharma	
	Cana Community, Kapel Santo Ignatius, Universitas Sanata Dharma	
Pengalaman Kerja	Yakkum Emergency Unit	
	• Financial Volunteer, Desember 2004 - Januari 2005	
	Senja Merah Interior Design & Craft	
	• Sales Promotion Girl, Juni 2005 - Juli 2005	